

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai keterlibatan perempuan pada keanggotaan legislatif DPRD Kota Batam Periode 2019-2024 dapat disimpulkan bahwa keterlibatan yang dilakukan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Batam tidak hanya didalam lembaga legislatif saja melainkan diluar kelembagaan juga anggota legislatif perempuan aktif dalam melakukan berbagai kontribusi.

Keterlibatan anggota legislatif perempuan dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan mereka dalam berbagai alat kelengkapan serta jabatan yang dimiliki masing-masing anggota legislatif perempuan. Anggota legislatif perempuan juga memberikan kontribusi berupa usulan dalam merumuskan anggaran APBD Kota Batam yang dibutuhkan dalam melaksanakan program-program perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas UMKM, Dinas Kepemudaan dan Olahraga diantaranya pelatihan dalam meningkatkan skill dalam membuat kue, berusaha dan membuka usaha baru. Anggota legislatif perempuan juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat seperti permasalahan pertanahan di Kota Batam. Selain itu anggota legislatif perempuan juga mendorong pemerintah untuk terlibat dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Keterlibatan anggota legislatif perempuan juga terlihat dalam penentuan APBD, dimana anggota legislatif perempuan yang berada di badan anggaran memberikan kontribusinya dan anggota legislatif perempuan di badan

anggota juga memperjuangkan program yang berhubungan dengan perempuan seperti pelatihan. Salah satu anggota legislatif perempuan juga ditunjuk sebagai wakil dalam penyusunan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam untuk lima tahun kedepan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan maka saran yang dapat diajukan dan diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Memperhatikan dan memfokuskan keterpilihan perempuan dalam kontesasi pemilihan umum, bukan hanya sekedar pemenuhan kuota 30%.
2. Memberikan kesempatan dan peluang kepada perempuan untuk memimpin dalam suatu badan yang ada dilembaga legislatif
3. Terdapat anggota perempuan pada setiap badan yang di alat kelengkapan khususnya pada badan pembentukan peraturan daerah (BAPEMPERDA) agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan dan kesetaraan gender.